

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penyajian data dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa program pelestarian kebudayaan Grebeg Suro Ponorogo Tahun 2024 melibatkan beberapa pihak, diantaranya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dengan PT. Local Hero Motivation sebagai *event organizer*, serta masyarakat. Adapun terdapat 4 kriteria yang menjadi tolak ukur keberhasilan kolaborasi dari pelaksanaan program pelestarian kebudayaan Grebeg Suro Ponorog Tahun 2024, meliputi:

1. Kriteria kondisi awal ditandai dengan adanya ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan antar pemangku kepentingan, sejarah dimasal lalu, serta dorongan dan kendala dalam berkolaborasi. Sebelum adanya kolaborasi terdapat kondisi awal berupa ketidakseimbangan sumber daya di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dimana terdapat kekurangan anggaran dalam pelaksanaan Grebeg Suro Ponorogo Tahun 2024 sehingga Disbudparpora Kab. Ponorogo berinovasi dan melakukan terobosan baru berupa kolaborasi dengan pihak swasta yaitu PT. Local Hero Motivation sebagai *event organizer*. Kemudian terdapat ketidakseimbangan pengetahuan antara pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan Grebeg Suro Ponorogo Tahun 2024, dimana Disbudparpora Kab. Ponorogo dalam pelaksanaannya hanya berpedoman pada tupoksi mereka dalam melestarikan kebudayaan tanpa ada ke arah entertain dan cenderung monoton

sehingga dengan adanya kolaborasi dengan pihak swasta ini terdapat upgrade dari segi manajemen event yang dilakukan oleh PT. Local Hero Motivation. Ketidakseimbangan pengetahuan tersebut juga terjadi pada pihak PT. Local Hero Motivation yang tidak terlalu mengerti mengenai prosesi dan acara grebeg suro ponorogo, tetapi hal kekurangan sumber daya serta pengetahuan antar pemangku kepentingan tersebut memiliki jalan keluar melalui kolaborasi yang ada. Sementara sejarah dimasa lalu yang belum tercipta dalam kolaborasi ini dikarenakan kolaborasi ini merupakan kali pertama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian dorongan serta kendala yang ada dalam kolaborasi ini adalah kekurangan anggaran yang ada pada Disbudparpora dan potensi yang ada dalam pelaksanaan grebeg suro dan kendala yang ada pada pemahaman mengenai event grebeg suro dari pihak local hero motivation.

2. Kriteria desain kelembagaan ditandai dengan adanya aturan dasar pendukung dan transparan. Aturan dasar yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam berkolaborasi yaitu MOU (*memorandum of understanding*) / PKS (perjanjian kerja sama) dimana terdapat fungsi-fungsi yang mengatur antar pemangku kepentingan sehingga tidak terdapat tumpang tindih tupoksi dalam berkolaborasi.
3. Kriteria kepemimpinan ditandai dengan adanya seorang fasilitator yang dapat merangkul serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat agar proses kolaborasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam hal ini kepemimpinan di dominasi oleh pihak Local Hero Motivation yang selalu

memberikan jalan keluar terhadap perbedaan pendapat yang ada pada tiap-tiap pemangku kepentingan.

4. Kriteria proses kolaborasi, yang terdapat lima proses kolaborasi yang telah berjalan cukup baik yaitu: 1) dialog tatap muka yang melibatkan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kab. Ponorogo dengan PT. Local Hero Motivation serta masyarakat dan dilaksanakan secara berurutan, 2) membangun kepercayaan dimulai dengan pemaparan profil yang dilakukan oleh pihak local hero motivation kepada pihak disbudparpora, pengesahan surat perjanjian kerjasama dan pemberian hak-hak antar pemangku kepentingan, 3) komitmen terhadap proses ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ada opada masing-masing stake holder, 4) pemahaman bersama semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama bahwa pelaksanaan grebeg suro ponorogo tahun 2024 harus tetap berjalan meskipun terdapat kekurangan anggaran, 5) hasil sementara berupa suksesnya pelaksanaan grebeg suro ponorogo tahun 2024 dengan adanya kekurangan anggaran serta terdapat keikutsertaan aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan grebeg suro ponorogo tahun 2024.

Secara umum proses kolaborasi dalam pelaksanaan program pelestarian kebudayaan di Kabupaten Ponorogo (studi pada Grebeg Suro Ponorogo tahun 2024) terdapat inisiatif dari masing-masing pemangku kepentingan yaitu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dengan PT. Local Hero Motivation sebagai (event organizer). Inisiatif yang berasal dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo untuk 98

melakukan kolaborasi dengan pihak PT. Local Hero Motivation guna menutupi kekurangan anggaran yang ada dalam pelaksanaan Grebeg Suro Ponorogo Tahun 2024. Kemudian setiap pemangku kepentingan yang ada dalam kolaborasi Grebeg Suro Ponorogo Tahun 2024 memiliki perannya masing-masing yaitu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo memiliki peran sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan Grebeg Suro Ponorogo dan PT. Local Hero Motivation sebagai event organizer yang memiliki peran untuk mencari sponsor dan melakukan manajemen event dalam pelaksanaan Grebeg Suro Ponorogo tahun 2024.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penyajian penyajian data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diulas sebelumnya, maka peneliti memberikan saran dan masukan yang membangun, sebagai berikut:

1. Menambah stakeholder yang ada dalam proses kolaborasi pelaksanaan Grebeg Suro Ponorogo. Hal ini akan menjadi langkah strategis untuk mencapai penyelenggaraan Grebeg Suro Ponorogo yang lebih optimal dan berkelanjutan. Setiap stakeholder yang berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan keahliannya masing-masing akan mempermudah dukungan operasional. Semakin banyak stakeholder yang digayet akan memperluas juga jejaring dan jangkauan promosi dari pelaksanaan Grebeg Suro Ponorogo.
2. Persepsi mengenai grebeg suro ponorogo sejak awal di tuangkan dalam perjanjian kerja sama dengan jelas, sehingga tidak ada perbedaan persepsi mengenai grebeg suro dalam proses kolaborasi. Dengan adanya pemaparan

yang rinci dalam dokumen kerja sama, potensi terjadinya perbedaan interpretasi atau miskomunikasi antar stakeholder dapat diminimalisir, sehingga proses kolaborasi dapat berjalan secara harmonis dan efektif.